



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 050 /KEP. 272 -DISKOMINFO/2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 - 2028

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
 - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan;
 - c. bahwa peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 - 2028;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang yang terintegrasi Tahun 2023 – 2028 yang digunakan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Tangerang.
- KETIGA** : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. pendahuluan;
 - b. kerangka kerja penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. analisis strategis sistem pemerintahan berbasis elektronik kota tangerang;
 - d. pengembangan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik kota tangerang; dan
 - e. penutup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 050 /KEP. 272 -DISKOMINFO/2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA

TANGERANG TAHUN 2023 - 2028

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2023 - 2028**



KOTA TANGERANG

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	6
I.1. Latar Belakang	6
I.2. Dasar Hukum	7
I.3. Hubungan antara Dokumen	7
I.4. Visi dan Misi SPBE.....	8
BAB II KERANGKA KERJA PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE	10
II.1. Analisis Dokumen Strategis.....	10
II.2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang Dikembangkan	11
II.3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan RKA-PD.....	12
II.4. Pengembangan Peta Rencana	13
II.5. Evaluasi.....	15
BAB III ANALISIS STRATEGIS SPBE KOTA TANGERANG	16
BAB IV PENGEMBANGAN PETA RENCANA SPBE KOTA TANGERANG	23
IV.1. Strategi Pengembangan.....	23
IV.2. Peta Rencana Kota Tangerang	26
BAB V PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Form Peta Rencana.....	14
Tabel III-1 Kondisi Arsitektur dan Rencana Tindakan.....	16
Tabel IV-1 Peta Rencana SPBE Kota Tangerang	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Gambar keterkaitan dokumen strategis SPBE	8
Gambar II-1 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE	10
Gambar II-2 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap I	11
Gambar II-3 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap II	11
Gambar II-4 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap III	13
Gambar II-5 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap IV	13
Gambar II-6 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap V	15
Gambar IV-1 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi	24
Gambar IV-2 Domain Arsitektur Layanan Kota Tangerang	25
Gambar IV-3 Lini Masa Penerapan Inisiatif Strategis SPBE Kota Tangerang	26

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat yang tinggi, maka penyusunan “Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028” di Lingkungan Kota Tangerang dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini mengikuti arahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.. Peta Rencana Kota Tangerang ini disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Kota Tangerang 2023-2028, dengan mengetahui kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan untuk kepentingan pengembangan SPBE Kota Tangerang ke depannya. Peta Rencana Tangerang 2023-2028 berfokus pada 3 inisiatif strategis sebagai dasar dalam pengembangan peta rencana. Masing-masing inisiatif dijabarkan menjadi 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK.

Semoga melalui Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028, pengembangan SPBE Pemerintahan Kota Tangerang berjalan sesuai dengan rencana, sehingga dapat mendukung pengembangan SPBE Nasional. Peta Rencana Kota Tangerang merupakan dokumen hidup yang dapat menyesuaikan kondisi lingkungan strategis Kota Tangerang. Oleh karena itu, peta rencana dapat disesuaikan kembali pada pertengahan waktu implementasi sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Demikian dokumen Peta Rencana Kota Tangerang ini kami susun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028 dapat terselesaikan dengan baik

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan berbasis elektronik bidang kesehatan (SPBE) merupakan upaya mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, merupakan langkah strategis Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan kualitas layanan dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan alat pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang pada akhirnya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan masyarakat serta pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

SPBE merupakan salah satu hal strategis dalam mendukung program-program strategis Kota Tangerang. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh Kota Tangerang dengan menerbitkan Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi banyak pengembangan SPBE di lingkungan Kota Tangerang.

Penataan dan pengelolaan SPBE dilakukan terhadap unsur SPBE yang terdiri atas: Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi kesehatan; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE. Penerapan SPBE dilaksanakan melalui proses tata kelola yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE yang meliputi: manajemen risiko SPBE; manajemen keamanan informasi; manajemen data; manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; manajemen sumber daya manusia; manajemen pengetahuan; manajemen perubahan; dan manajemen layanan SPBE.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus dilakukan untuk mendukung transformasi digital. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Secara umum peran arsitektur SPBE dalam transformasi digital yaitu menjadi kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, dan aplikasi keamanan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, Arsitektur SPBE juga menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Implementasi dari arsitek yang telah dibangun selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan SPBE.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Kota Tangerang yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kota Tangerang. Perencanaan SPBE dibuat dengan melakukan analisis strategis terhadap dokumen perencanaan strategis Kota Tangerang (Renstra, Arsitektur SPBE Kota Tangerang, atau dokumen strategis lain terkait pengembangan SPBE Kota Tangerang). Sehingga menghasilkan inisiatif strategis dalam pengembangan layanan SPBE Kota Tangerang.

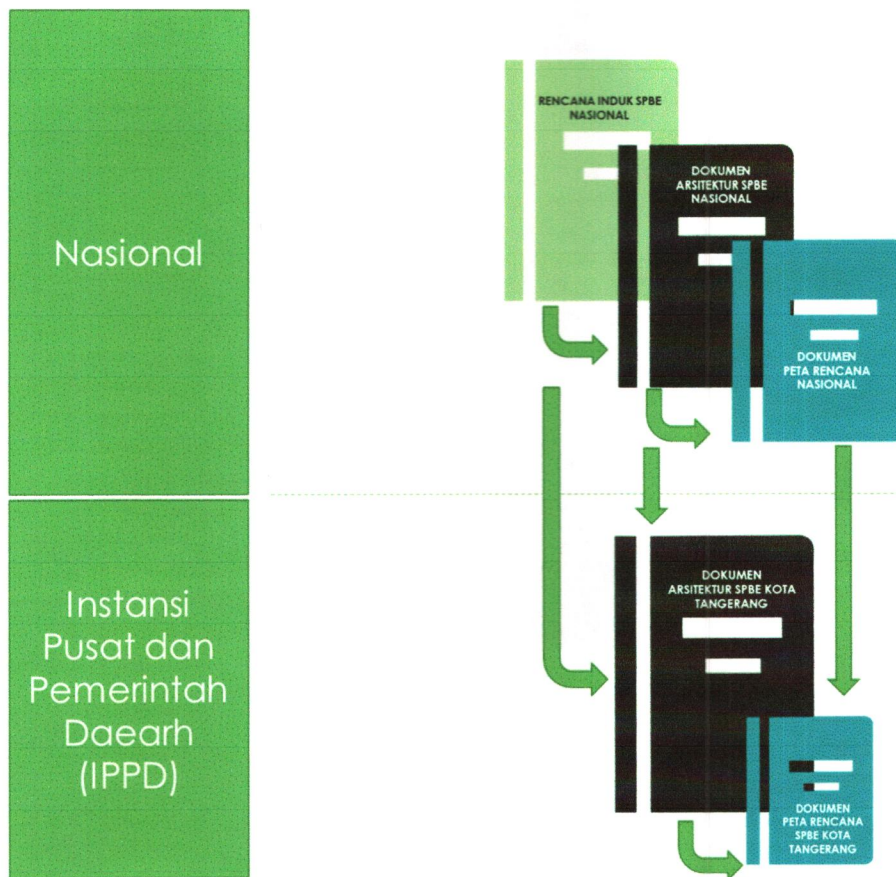
1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pekerjaan "Penyusunan *Draft Masterplan* TIK (Arsitektur SPBE) Pemerintah Kota Tangerang" yang digunakan diantaranya namun tidak terbatas pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- g. PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- h. Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3. Hubungan antara Dokumen

Rencana Induk SPBE Nasional merupakan pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan amanat dari Perpres 132 Tahun 2022. Oleh karena itu, dokumen Arsitektur SPBE Kota Tangerang 2023-2028 dibangun dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Nasional, seperti terlihat pada Gambar I-1.



Gambar I-1 Gambar keterkaitan dokumen strategis SPBE

I.4. Visi dan Misi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kerangka yang memadukan antara strategi, bisnis, dan teknologi. Sisi strategi digambarkan dengan visi dan misi. Visi dan misi SPBE Kota Tangerang diselaraskan dengan visi dan misi SPBE Nasional, dimana visi SPBE Nasional adalah:

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kota Tangerang merupakan rumusan dari arah yang menjelaskan kondisi yang ingin dicapai pada periode 2023-2028, yang menjawab permasalahan pembangunan SPBE jangka menengah daerah. Visi ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah dan nasional. Visi SPBE Kota Tangerang 2023-2028 yaitu:

"Terwujudnya Kota Tangerang sebagai pelopor penerapan SPBE untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Misi SPBE Nasional adalah:

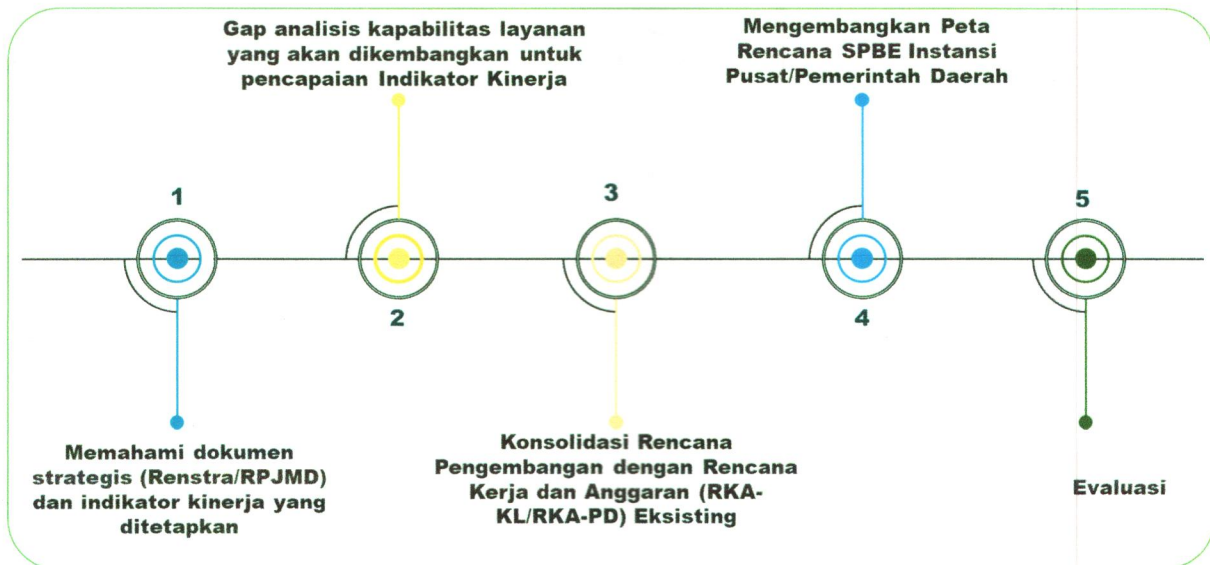
- a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- d. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Misi SPBE Kota Tangerang 2023-2028 adalah:

- a. meningkatkan sistem kinerja administrasi dan tata kelola sistem pemerintahan yang optimal melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- c. meningkatkan cakupan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
- d. mengembangkan sumber daya manusia yang handal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
- e. Mengembangkan dan mengelola database dan informasi daerah yang valid dan terpadu secara horizontal dan vertikal.

BAB II

KERANGKA KERJA PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE



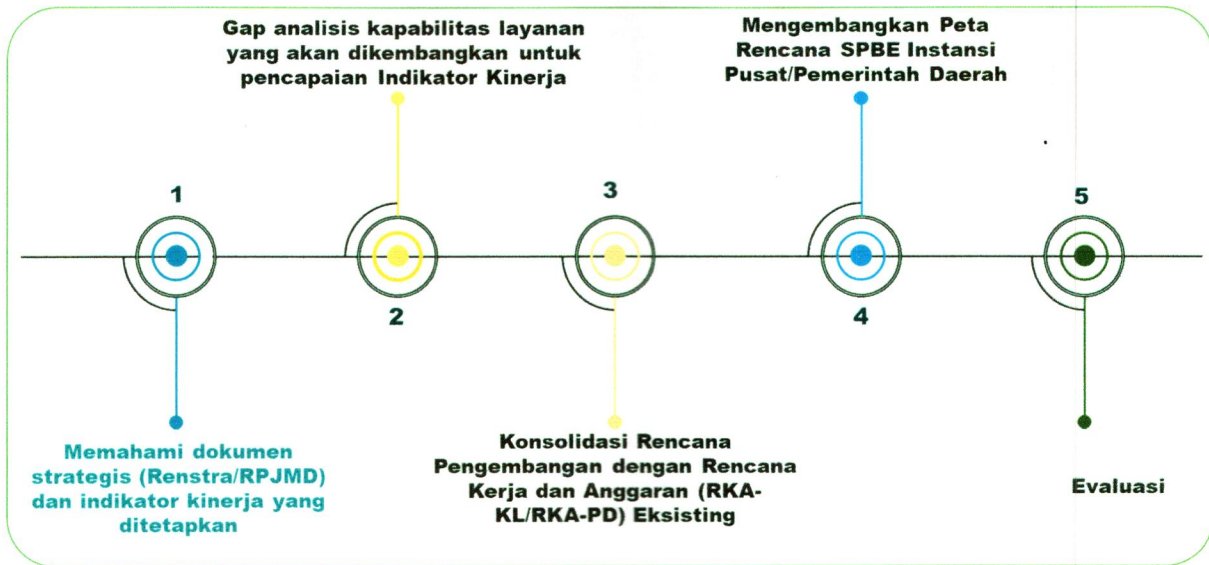
Gambar II-1 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE

Penyusunan Peta Rencana SPBE secara umum mengikuti kerangka kerja yang digambarkan pada Gambar II-1 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE. Dimana terdapat 5 (lima) tahapan siklus pengembangan yang terdiri dari:

1. Analisis Dokumen Strategis
2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang Dikembangkan
3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan RKA-PD
4. Pengembangan Peta Rencana
5. Evaluasi

II.1. Analisis Dokumen Strategis

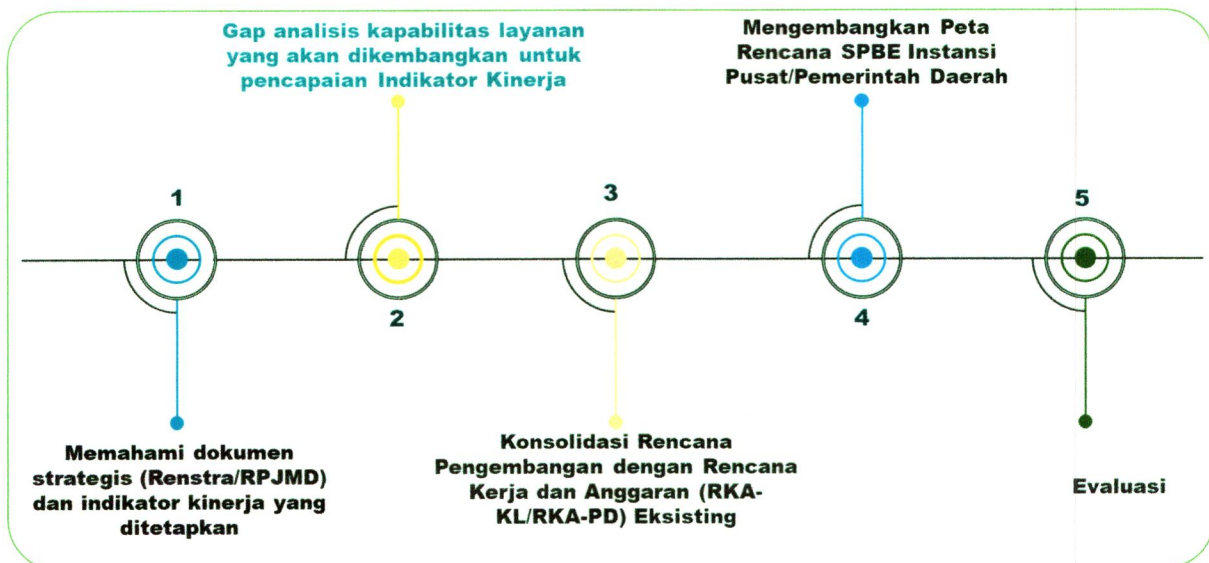
Pada tahap I, diperlukan hasil analisis dokumen strategis pengembangan daerah yang ada pada RPJMD. Pemahaman terhadap dokumen RPJMD merupakan hal yang krusial sebelum melakukan analisis dokumen strategis. Hal-hal yang perlu dipahami antara lain memahami sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen strategis, serta indikator kinerja utama yang merupakan alat ukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai. Selain RPJMD, dokumen strategis yang perlu dianalisis antara lain *Grand Design/ Road Map* Pengembangan Daerah, Arsitektur SPBE, Masterplan TIK, RKA-PD, dan dokumen lain yang setara dan menggambarkan pengembangan daerah secara umumnya, serta pengembangan layanan daerah secara khusus.



Gambar II-2 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap I

II.2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang Dikembangkan

Setelah memahami dokumen strategis, tahap II adalah melakukan gap analisis terhadap layanan-layanan yang akan dikembangkan di daerah. Hal ini dapat diperoleh dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan terutama pada arsitektur SPBE. Setelah mengidentifikasi adanya kesenjangan, maka dapat diperoleh inisiatif strategi TIK yang perlu ditempuh.



Gambar II-3 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap II

Strategi TIK difokuskan pada bagaimana teknologi akan memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Strategi TIK berfokus pada aplikasi, data dan teknologi yang diperlukan untuk memberikan layanan.

Agar dapat memberikan nilai, strategi TIK perlu diselaraskan dengan sasaran strategis. Pengembangan sasaran strategi yang aspiratif dan dapat dicapai, bergantung pada pemahaman yang baik tentang kemampuan dari layanan TIK yang ada.

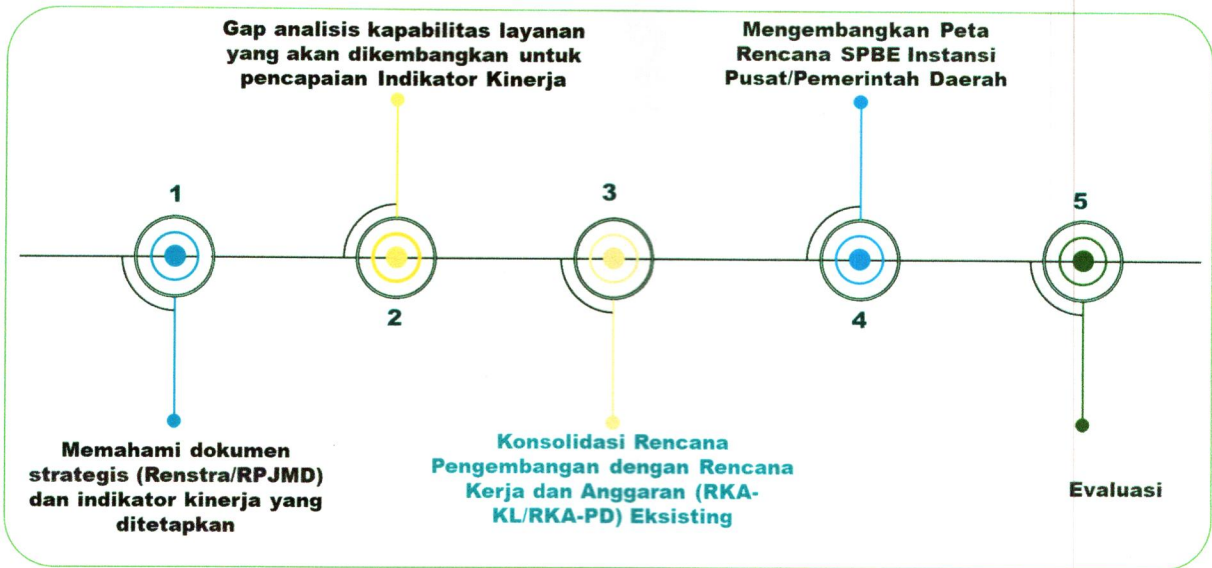
Penerapan Arsitektur SPBE bertujuan untuk menunjukkan bagaimana investasi TIK terkait dengan tujuan strategis dan bagaimana investasi ini akan membantu mencapai hasil yang dapat diukur dari tujuan strategis bisnis tersebut. Karena, perspektif strategis inilah peran Arsitektur SPBE sangat cocok untuk membantu dalam pengembangan sasaran strategis dan TIK.

Untuk membantu pengembangan sasaran strategis dan TIK, Maka unit pengelola Arsitektur SPBE pada tingkat instansi dan daerah (IPPD) harus dapat menyediakan:

- a. Pemahaman tentang bagaimana solusi TIK dapat mendorong efisiensi hasil dari pencapaian sasaran strategis.
- b. Membentuk visi dan tujuan strategis untuk memastikan tercapainya teknologi yang tersedia saat ini dan di masa yang akan datang.
- c. Pemahaman tentang sinergi yang tersedia dari jalur strategis, unit bisnis yang berbeda di dalam IPPD, segmen industri serupa di luar IPPD dan di seluruh pemerintahan.
- d. Memahami kapabilitas TIK yang ada, menilai bisnis dan kesesuaian TIK, dan mengidentifikasi kapabilitas yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan untuk mendukung visi strategis.
- e. Memfasilitasi penyelarasan strategi TIK dengan sasaran strategis.

II.3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan RKA-PD

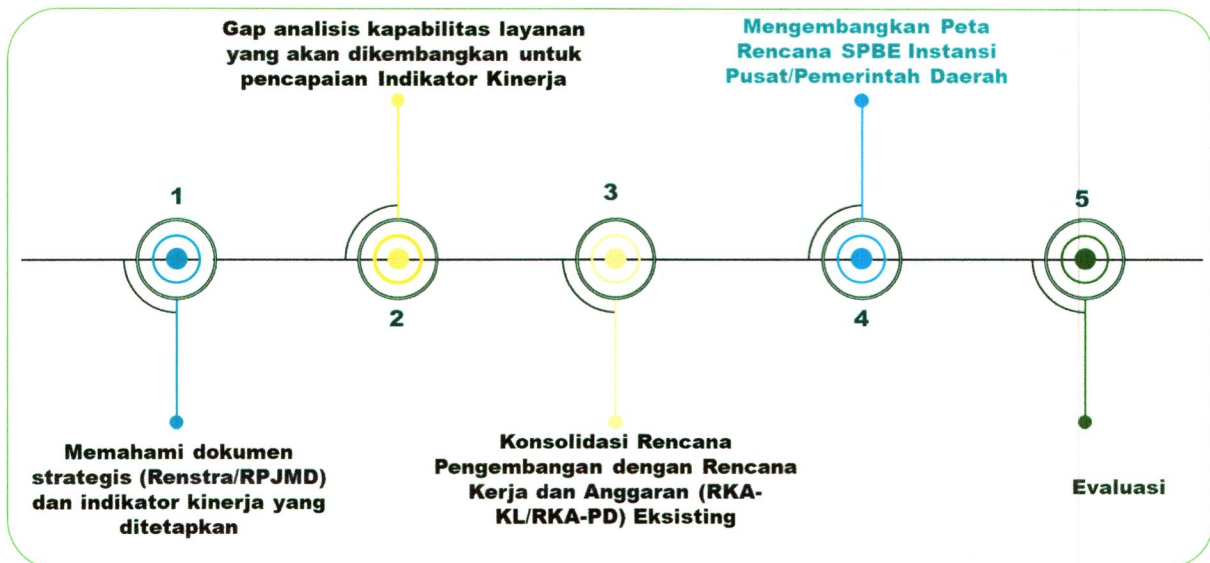
Masing-masing inisiatif strategis yang dijabarkan dalam 7 aspek peta rencana yang berisi program dan kegiatan terkait pengembangan SPBE. Konsolidasi RKA-PD dengan perencanaan SPBE akan menjaga keselarasan penerapan SPBE dengan rencana kerja daerah yang sudah dianggarkan dan memiliki nomenklatur baku.



Gambar II-4 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap III

II.4. Pengembangan Peta Rencana

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari inisiatif strategis yang dijabarkan menjadi 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK.



Gambar II-5 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap IV

Masing-masing aspek peta rencana akan berisi program dan kegiatan yang dapat mendukung target yang telah ditetapkan baik target kinerja maupun anggaran yang telah ditetapkan. Form peta rencana dapat mengikuti Tabel II-1 Form Peta Rencana.

Tabel II-1 Form Peta Rencana

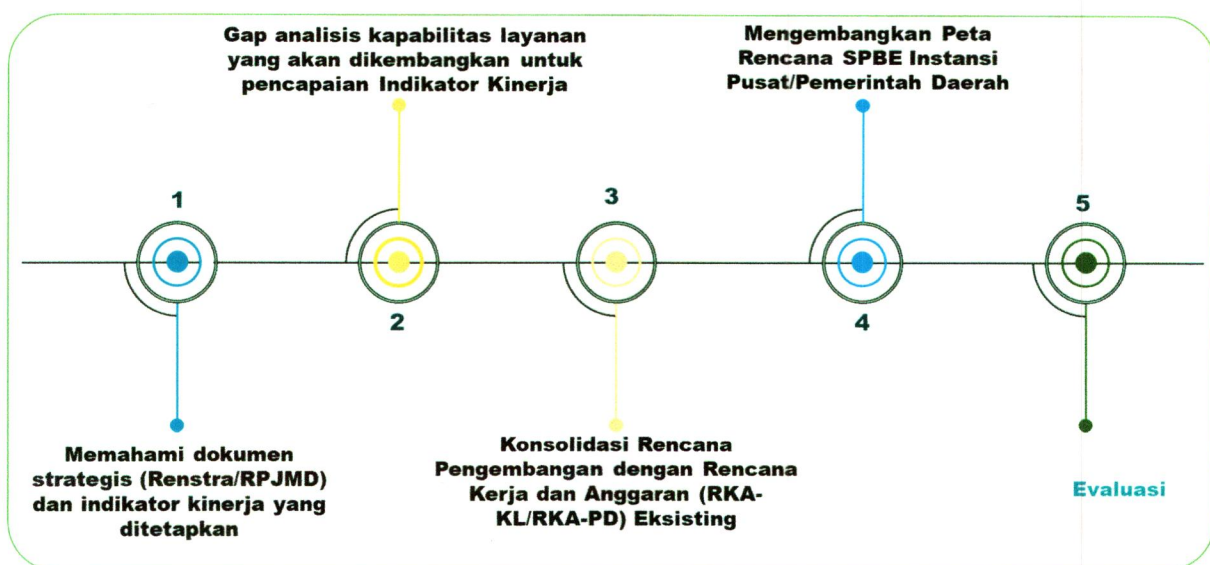
No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2023	2024	n+1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)				(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1	Tata Kelola					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
	B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
2	Manajemen					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
3	Layanan					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
4	Aplikasi					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
5	Infrastruktur					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
6	Keamanan					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
7	Audit TIK					
	A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- (Kegiatan)				
		- (Kegiatan)				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1	Tata Kelola					
...						

7	Audit TIK							
...								

II.5. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai. (Permen PPN/Bappenas No. 1/2017). Evaluasi Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan di akhir tahun pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. Bagian yang akan dievaluasi adalah:

- 1 Pelaksanaan Rencana Tindakan / Program dan Kegiatan pada Peta Rencana SPBE Kota Tangerang
- 2 Capaian terhadap Target yang ditetapkan pada Dokumen Strategis



Gambar II-6 Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE-Tahap V

BAB III

ANALISIS STRATEGIS SPBE KOTA TANGERANG

Secara umum peran arsitektur SPBE dalam transformasi digital yaitu menjadi kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, dan aplikasi keamanan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, Arsitektur SPBE juga menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kondisi arsitektur yang diinginkan dan rencana tindakan yang akan ditempuh dalam Arsitektur SPBE Kota Tangerang tertera pada tabel di bawah.

Tabel III-1 Kondisi Arsitektur dan Rencana Tindakan

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
Arsitektur Proses Bisnis			
B1	Penggambaran proses bisnis saat ini merupakan gambaran kondisi lingkungan strategis hingga 2023.	Penggambaran proses bisnis harus mengacu pada referensi SPBE Nasional dan disesuaikan dengan lingkungan strategis 2024-2028.	Penyelarasan proses bisnis Kota Tangerang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis 2024-2028
B2	Proses bisnis saat ini masih digambarkan berdasarkan kelompok proses.	Pemetaan kembali proses bisnis berdasarkan fungsi dan urusan yang diemban. Agar bisa disesuaikan dengan proses bisnis nasional. Dan memastikan seluruh layanan dan aplikasi yang diselenggarakan sudah sesuai dengan proses bisnis.	Penyelarasan proses bisnis secara top down dan bottom up, sehingga sesuai dengan layanan dan aplikasi yang diselenggarakan.
B3	Proses bisnis saat ini belum dianalisis terhadap dukungan layanan berbasis teknologi	Melakukan inventarisasi inovasi proses bisnis pada semua perangkat daerah yang akan memerlukan dukungan pengembangan aplikasi baik perubahan aplikasi yang ada maupun pengembangan aplikasi baru	Inovasi proses bisnis secara periodik dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja layanan, dan integrasi layanan dan aplikasi
Arsitektur Layanan			
L1	Pengelompokan layanan saat ini merupakan hasil dari pengelompokan aplikasi sejenis dan proses bisnis yang didukung	Pengelompokan layanan akan mengikuti setiap dinamika proses bisnis yang menunjang arah strategis Kota Tangerang.	Penetapan regulasi untuk pengelompokan layanan mulai identifikasi layanan melalui pemetaan proses bisnis yang terintegrasi sampai dengan sosialisasi dan operasionalisasi layanan

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
L2	Terdapat 30 layanan teridentifikasi di Kota Tangerang yang mendukung 19 Proses Bisnis. KT-09 Meningkatnya Pembinaan dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat belum memiliki layanan yang teridentifikasi.	Pengelompokan kategori layanan sesuai tugas, fungsi, dan seluruh proses bisnis yang ada.	- Identifikasi layanan terintegrasi melalui pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi - Identifikasi aplikasi, data dan informasi
L3	Beberapa layanan yang ada saat ini masih belum terintegrasi dengan aplikasi terintegrasi	Seluruh layanan sudah mengimplementasikan aplikasi terintegrasi, sesuai dengan kelompok masing-masing	- Integrasi layanan administrasi pemerintah dan layanan publik serta, pengembangan aplikasi terintegrasi.
Arsitektur Aplikasi			
A1	Aplikasi umum (nasional) yang ada di Kota Tangerang, masih dikelola masing-masing OPD dan tidak masuk dalam aplikasi yang diinventaris oleh Diskominfo.	Seluruh aplikasi baik khusus yang dikembangkan dan dikelola Kota Tangerang dan aplikasi umum yang bersifat nasional harus terinventarisasi dan terkelola.	Pengembangan prosedur untuk inventarisasi aplikasi umum ke Diskominfo sebagai OPD pengelola TIK.
A2	Di Kota Tangerang saat ini terdapat 203 aplikasi yang tercatat diwebsite katalog Kota Tangerang yang terdiri dari Website, Mobile Aplikasi Android dan IOS.	Yang Diinginkan Aplikasi di Kota Tangerang diharapkan bisa terealisasi dengan baik sebagai pembantu layanan yang ada di Kota Tangerang dan juga diharapkan dapat sepenuhnya terpakai dengan baik dan tidak ada kesamaan fungsi aplikasi kedepannya.	Terus lakukan pembaharuan sesuai kebutuhan dilapangan baik untuk OPD maupun masyarakatnya, dengan memfokuskan ketumpang tindihan antar aplikasi yang sama dan integrasi antar aplikasi, sehingga aplikasi yang sudah ada bisa berguna sesuai kebutuhan OPD dan masyarakat.
A3	Aplikasi UMUM Layanan Publik : Aplikasi yang digunakan secara bagi pakai oleh OPD untuk mendukung pelayanan publik yang berhubungan langsung untuk melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan antar OPD, sebagai tindak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Di mana Saat ini Kota Tangerang telah melakukan banyak pelayanan publik terkait bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat Menggunakan Aplikasi Layanan Publik yang sudah diterapkan Nasional.	Meningkatkan kegunaan aplikasi agar memudahkan dalam kegunaan dan pengintegrasian dengan aplikasi yang dimiliki OPD terkait, baik dari Fitur, fungsi maupun data.	- Membuat list kebutuhan OPD terkait aplikasi - Sosialisasikan kepada masyarakat mengenai fungsi aplikasi atau layanan online nya agar masyarakat bisa lebih mengimplementasikannya secara rutin dalam kegiatan sehari-hari menggunakan aplikasi.

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
A4	Aplikasi UMUM Administrasi Pemerintahan: Aplikasi yang digunakan secara bagi pakai oleh OPD untuk mendukung administrasi pemerintahan atau menjadi dasar operasional dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi yang dimiliki Kota Tangerang	Meningkatkan kegunaan aplikasi agar terintegrasi antar OPD terkait, baik dari Fitur, fungsi maupun data.	Evaluasi dan tindak lanjut pengembangan aplikasi terintegrasi lintas OPD di Kota Tangerang secara periodik.
A5	Aplikasi KHUSUS Misi Tertentu : Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain dan dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan aplikasi ini mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan di Kota Tangerang aplikasi seperti ini sudah beroperasi sesuai kebutuhan yang sedang terjadi di lapangan, contohnya seperti beberapa aplikasi terkait vaksinasi, atau aplikasi yang menyangkut covid, yang baru dikembangkan saat dibutuhkan	Meningkatkan kegunaan aplikasi agar terintegrasi antar OPD terkait, baik dari Fitur, fungsi maupun data.	-Membuat list kebutuhan OPD terkait aplikasi -Sesuai dengan kebutuhan Tertentu aplikasi khusus harus dibuat dan digunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga Rencana Tindakan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu.
A6	Aplikasi KHUSUS Fungsi Tertentu : Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain dan dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan di Kota Tangerang sendiri ada beberapa OPD yang sudah menerapkan ini.	Meningkatkan kegunaan aplikasi agar terintegrasi antar OPD terkait, baik dari Fitur, fungsi maupun data.	Sesuai dengan kebutuhan Tertentu aplikasi khusus harus dibuat dan digunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga Rencana Tindakan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu.
Arsitektur Data dan Informasi			
D1	Jumlah entitas data yang terdapat pada Pemerintah Kota Tangerang berjumlah sangat banyak yang dibagi menjadi empat level.	Melakukan simplifikasi (penderhanaan/ pengurangan) jumlah entitas Data, sehingga sesuai dengan proses bisnis yang dikembangkan	Generalisasi/ pengelompokkan Data menjadi yang lebih umum dengan cara penambahan Level 0 pada Domain Data Kota Tangerang.

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
D2	Tidak semua entitas data digunakan dalam aplikasi eksisting kota Tangerang	Pemanfaatan data yang ada agar mendukung seluruh layanan maupun aplikasi yang dikembangkan	Integrasi <i>database</i> dan aplikasi
D3	Terdapat duplikasi data pada beberapa dinas (penamaan sama persis)	Seluruh data di Kota Tangerang teridentifikasi secara unik dan bermanfaat.	Pengembangan <i>database</i> dengan kodifikasi data yang rigid. Sehingga menghilangkan redundansi data
D4	Data yang seharusnya ada pada aplikasi di Kota Tangerang banyak yang tidak terupdate/ tidak exist	Memperbarui prosedur pembaruan data sehingga punya standar evaluasi pembaruan data yang harus dijalankan.	Pembaruan data aplikasi dilakukan secara periodik
D5	Penamaan entitas data belum seragam/ terstandarisasi (penamaan beberapa kata masih berbeda, yang sebenarnya memiliki arti yang sama)	Penamaan data agar yang terstandarisasi tidak menimbulkan ambiguitas	Melakukan penyeragaman penamaan data harus dilakukan oleh Kota Tangerang.
D6	Belum ada roadmap pembangunan statistik sektoral kota tangerang	Memiliki roadmap pembangunan statistik sektoral kota tangerang	- Menyusun <i>roadmap</i> pengembangan Statistik Sektoral - Mengimplementasikan dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap <i>roadmap</i>
D7	Kebijakan dan Prosedur Klasifikasi dan Penanganan Informasi sudah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan ISO 27001:2013 dengan referensi Annex 8.2, Annex 8.3, dan Annex 13.2	Secara konsisten mengimplementasikan ISO terbaru agar keamanan yang digunakan merupakan yang termutakhir untuk saat ini, bertujuan agar informasi dapat terjaga dengan baik.	Melakukan <i>surveillance</i> audit terhadap standar keamanan ke ISO 27001.
Arsitektur Infrastruktur			
I1	Menerapkan konsep komputasi awan secara maksimal. Kota Tangerang memiliki dua komputasi awan yang berada di Diskominfo Kota Tangerang dengan status kepemilikan sendiri, dan <i>Co-Location</i> di Jakarta yang bekerja sama dengan pihak <i>external</i> . Untuk menghadapi suatu bencana yang tidak terduga, Kota Tangerang memiliki <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> yang berada di Bali	Infrastruktur komputasi awan kedepannya diharapkan dapat terintegrasi dengan pusat data nasional.	Melakukan integrasi dengan pusat data nasional
I2	Untuk setiap pembuatan aplikasi, saat ini masih dikerjakan oleh Diskominfo Kota Tangerang	Adanya wadah bagi OPD untuk melakukan permintaan pembuatan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan OPD tersebut. OPD dapat melakukan customisasi keinginan pembuatan aplikasi	Mengembangkan <i>Private Cloud</i> yang berguna untuk melayani permintaan pembuatan aplikasi. <i>User</i> akan dapat melakukan kostumisasi aplikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
13	Perangkat lunak platform yang dimiliki Kota Tangerang saat ini telah mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses melalui <i>website</i> , <i>mobile android</i> , dan juga <i>mobile ios</i> .	Perangkat lunak yang digunakan Kota Tangerang dapat membantu kinerja sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman	<ul style="list-style-type: none"> -Melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak yang berlisensi secara berkala -Memaksimalkan pembangunan dan penggunaan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan perangkat kerja serta masyarakat
14	Perangkat keras server yang digunakan Pemerintah Kota Tangerang sudah dapat mentransfer data secara efisien, dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengiriman sumber daya sehingga terhindar dari server yang <i>overload</i> karena Pemerintah Kota Tangerang memiliki server yang digunakan sebagai <i>Load Balancer</i> .	Penambahan dan peningkatan perangkat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> -Diperlukan peningkatan perangkat seperti <i>memory</i>, <i>storage</i>, dan prosesor serta memerlukan penambahan prasarana berupa daya listrik, dan pendingin untuk mendukung operasional yang berjalan di Pemerintah Kota Tangerang. -Penambahan perangkat <i>rack</i>, dan server yang terstandarisasi
15	Perangkat keras media penyimpanan yang dimiliki Kota Tangerang memiliki kapasitas yang memadai guna mendukung operasional pemerintah yang berjalan.	Peningkatan penyimpanan dan diperlukan penambahan perangkat untuk <i>storage</i> server untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan perangkat penyimpanan yang digunakan. -Penambahan perangkat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dan terstandarisasi
16	Dalam mendukung konektivitas antar perangkat agar dapat melakukan pertukaran file serta dapat saling berbagi data dan sumber daya lainnya, Pemerintah Kota Tangerang sudah menggunakan perangkat yang memadai.	Penambahan perangkat guna memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang.	Penambahan perangkat <i>network</i> seperti <i>router</i> , <i>switch</i> , <i>access point</i> , dan lain-lain guna meningkatkan <i>performansi jaringan</i> yang terstandarisasi
17	Pemerintah Kota Tangerang sudah memiliki berbagai teknologi yang dapat mencegah kejahatan komputer (<i>cyber crime</i>) dan untuk berbagai fungsi tertentu. Teknologi tersebut berupa <i>Firewall</i> , <i>Wireless Intrusion Prevention and Detection System</i> , serta <i>Load Balancer</i> .	Terjaminnya keamanan untuk berbagai teknologi yang ada di Kota Tangerang	Untuk meningkatkan keamanan, Kota Tangerang akan mengembangkan SOC (Security Operation Center). Pengembangan SOC ini juga memerlukan penambahan ruangan SOC dan penambahan perangkat pendukung SOC
		Penambahan dan pembaruan perangkat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> -Penambahan server untuk keamanan -Upgrade perangkat sensor pada data center -Penambahan perangkat <i>peripheral</i> baik jenis <i>input</i>, <i>output</i>, maupun <i>input/output</i> yang sesuai dengan kebutuhan.

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
18	Penggunaan sistem penghubung layanan di Pemerintah Kota Tangerang telah berjalan menggunakan API <i>service</i> dan API <i>Getaway</i> (open data v2, <i>service</i> tangerang live, <i>payment getaway</i>).	Menerapkan layanan <i>middleware</i> untuk sistem penghubung layanan pemerintah dan menggunakan API <i>Getaway</i> untuk lebih memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE	Menerapkan layanan <i>middleware</i> untuk sistem penghubung layanan pemerintah dan menggunakan API <i>Getaway</i>
19	Terdapat dua jaringan intra pemerintah yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang yaitu Jaringan Internet dan Intranet yang menghubungkan antar OPD yang berlokasi di gedung Puspem Kota Tangerang tipe UTP, dan Jaringan Internet dan Intranet yang menghubungkan Gedung MPP dengan Gedung Puspem Kota Tangerang tipe <i>Fiber Optic</i> . Dengan <i>bandwith</i> yang masih perlu ditingkatkan khususnya pada tipe <i>fiber opticnya</i> .	Peningkatan keamanan pada jaringan agar proses pengiriman data dan informasi dapat lebih terlindungi.	Diskominfo Kota Tangerang kedepannya akan mengembangkan jaringan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan <i>bandwith</i> yang lebih stabil sehingga downtime pada jaringan dapat diminimalisir. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kota Tangerang perlu menyiapkan perangkat pendukung untuk mengembangkan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
110	Ruang Data Center Kota Tangerang Bersertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, <i>Colocation Server</i> , dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Secara menyeluruh dan berkala sehingga SMKI di Kota Tangerang dapat terkelola dan terupdate berdasarkan ISO 27001:2013 dan dapat terus digunakan	Melakukan audit ISO 27001, <i>Colocation Server</i> , dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) secara berkala
Arsitektur Keamanan			
K1	Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kota Tangerang saat ini sudah berjalan dengan baik dan terkelola dengan detail.	Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Secara menyeluruh dan berkala sehingga SMKI di Kota Tangerang dapat terkelola dan terupdate berdasarkan ISO 27001:2013, memiliki sistem keamanan honeypot dan dapat memiliki DMZ untuk infrastruktur TIK, dapat menyediakan layanan <i>SecaaS</i> , dan meningkatkan ruang lingkup ISO 27001:2013.	<ul style="list-style-type: none"> - Update instrument uji kelaikan secara mandiri pada seluruh lapisan di Kota Tangerang - Penambahan honeypot secara menyeluruh di Kota Tangerang - Pengembangan DMZ pada infrastruktur TIK di Kota Tangerang - Penyediaan layanan <i>security as a services</i> (<i>SecaaS</i>) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE - Peningkatan ruang lingkup ISO 27001 (Operasional Data Center, jumlah titik pengamanan)

KODE	Arsitektur Saat Ini	Arsitektur Target	Rencana Tindakan
K2	Audit dan Uji Kelaikan di Kota Tangerang sudah berjalan setiap tahunnya.	Menerapkan Audit dan Uji Kelaikan secara berkala dengan terus melakukan dan menambahkan Uji kelaikan aplikasi umum, infrastruktur, keamanan system penghubung layanan, dan keamanan jaringan intra pemerintah selain Uji kelaikan Kota Tangerang akan terus melakukan pengujian aplikasi/sistem dengan pentester atau audit khusus keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Uji kelaikan keamanan aplikasi umum Kota Tangerang - Uji kelaikan keamanan infrastruktur - Uji kelaikan keamanan sistem penghubung layanan - Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah - Pengujian aplikasi/sistem dengan pentester atau audit khusus keamanan
K3	Penanganan Insiden dan Integrasi Keamanan di Kota Tangerang telah berjalan.	Meningkatkan Penanganan Insiden dan Integrasi Keamanan di Kota Tangerang dengan terus melakukan <i>malware analysis</i> , dan meningkatkan keamanan <i>microservice</i> dan API, juga mengembangkan BCP	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Keamanan <i>Microservice</i> dan API / interoperabilitas data / JWT - Malware analysis - Pengembangan Business Continuity Planning (BCP)
K4	<i>Security Awareness</i> / Penerapan Budaya Keamanan Informasi masih terkelola dengan baik.	Meningkatkan <i>Security Awareness</i> / Penerapan Budaya Keamanan Informasi di Kota Tangerang dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi tentang kesadaran keamanan dan juga menggunakan <i>software</i> atau aplikasi berlisensi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pada pelatihan dan sosialisasi kesadaran keamanan informasi di Kota Tangerang secara periodik. - Penggunaan <i>software/aplikasi</i> dengan <i>original license</i>
K5	Optimasi Keamanan Digital di Kota Tangerang masih dalam tahap pengembangan	Meningkatkan Optimasi Keamanan Digital di Kota Tangerang dengan peningkatan manfaat sertifikasi tanda tangan digital elektronik dan juga mengikuti mandate UU tentang perlindungan data diri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan sertifikat tanda tangan elektronik pada setiap aplikasi di Kota Tangerang. - Perlindungan data pribadi sesuai mandate UU.

BAB IV

PENGEMBANGAN PETA RENCANA SPBE KOTA TANGERANG

IV.1. Strategi Pengembangan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

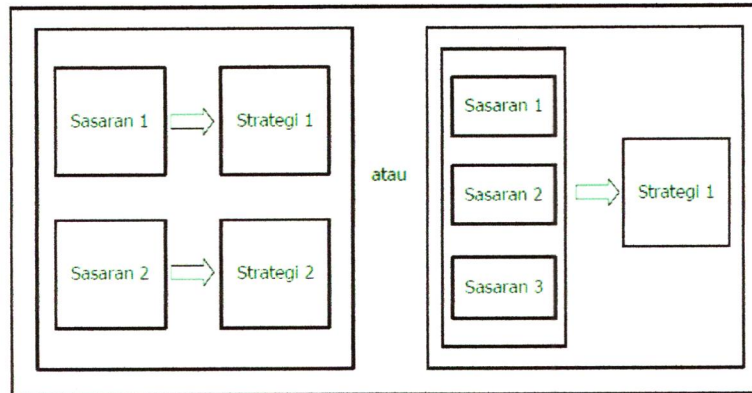
1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak- belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana Gambar IV-1 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi berikut:

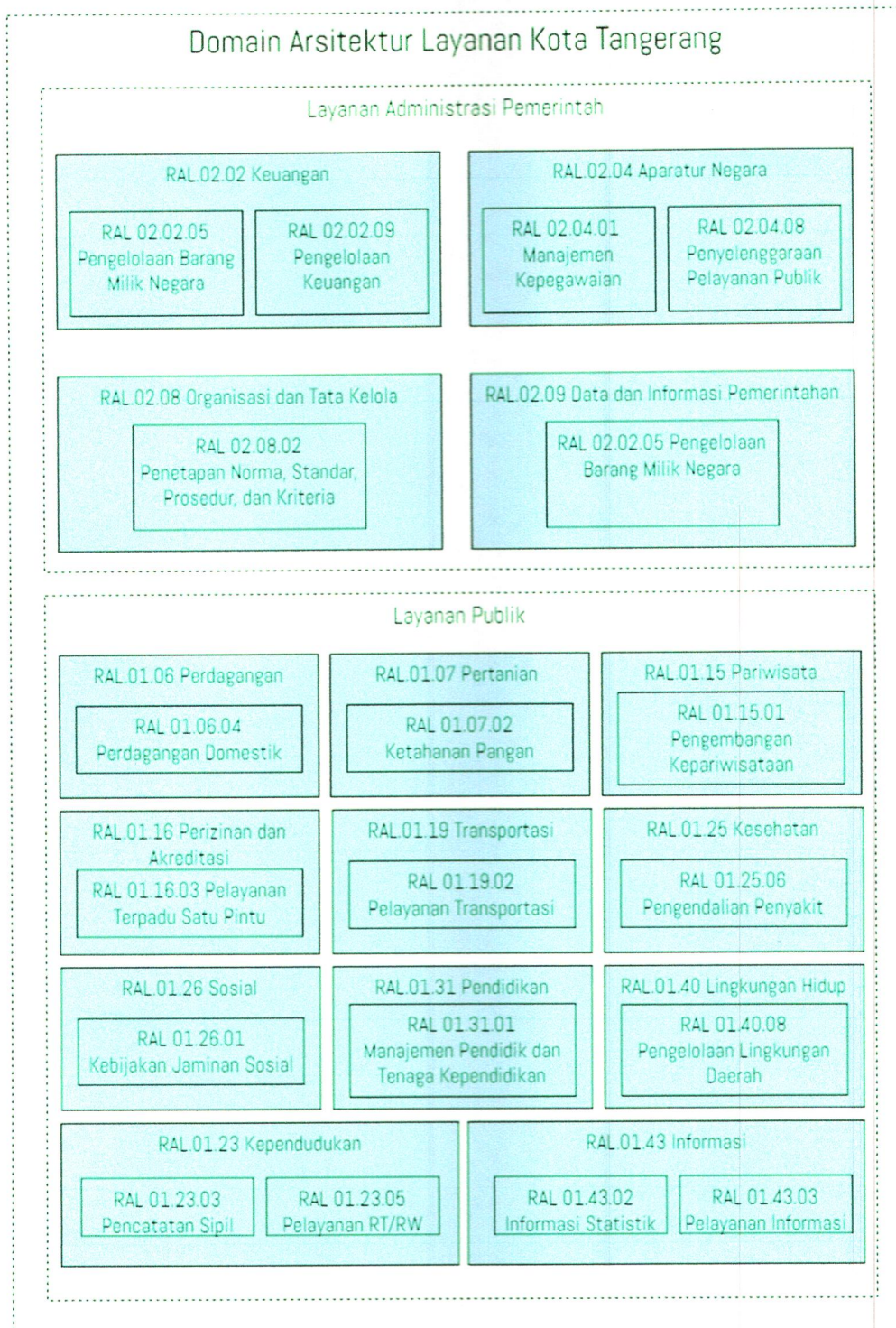


Gambar IV-1 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi

Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi. Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ke tidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan

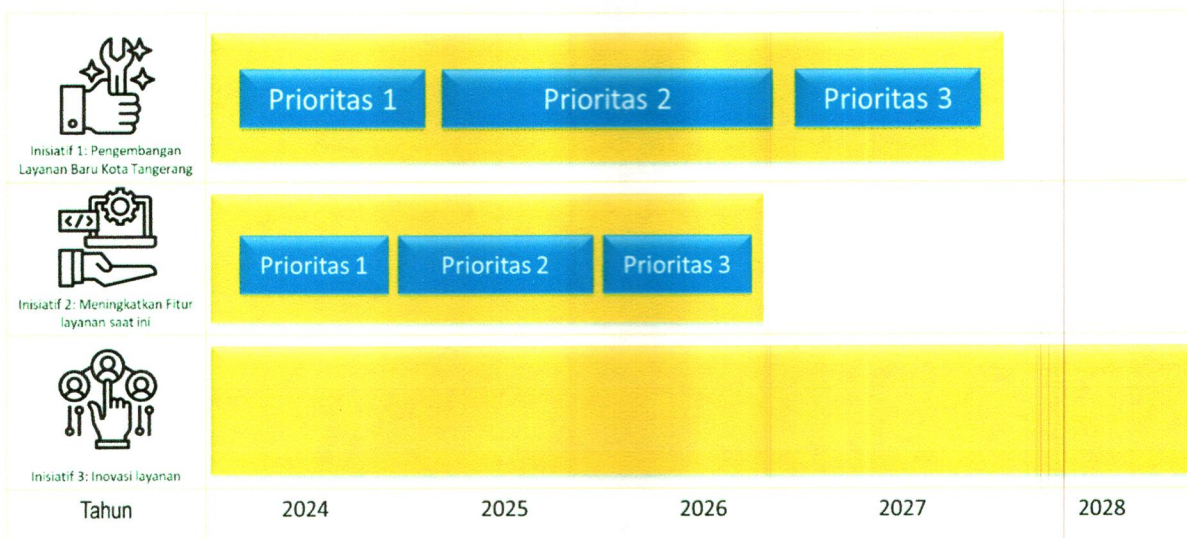
Kondisi yang diinginkan dari pengembangan SPBE Kota Tangerang yaitu melakukan *improvement* (peningkatan dan perbaikan) terhadap layanan dan aplikasi yang saat ini ada, serta mengembangkan layanan dan aplikasi baru yang dapat menunjang seluruh fungsi yang diemban oleh Kota Tangerang. Domain layanan Kota Tangerang digambarkan pada Gambar IV-2 Domain Arsitektur Layanan Kota Tangerang.



Gambar IV-2 Domain Arsitektur Layanan Kota Tangerang

Secara umum strategi yang ditempuh dibagi menjadi 3 inisiatif strategis (yang lini masa implementasinya terlihat pada Gambar IV-3 Lini Masa Penerapan Inisiatif Strategis SPBE Kota Tangerang) , yaitu:

1. Inisiatif 1 → Pengembangan layanan baru kota Tangerang
2. Inisiatif 2 → Meningkatkan fitur layanan saat ini
3. Inisiatif 3 → Inovasi layanan



Gambar IV-3 Lini Masa Penerapan Inisiatif Strategis SPBE Kota Tangerang

- Prioritas 1 : layanan yang diambil dari urusan prioritas daerah (program prioritas)
- Prioritas 2 : layanan bukan prioritas daerah, namun dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atau kinerja aparatur
- Prioritas 3 : layanan pendukung yang tidak prioritas, atau masih bisa dijalankan secara *offline*

IV.2. Peta Rencana Kota Tangerang

Kota Tangerang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tantangan besar dalam mengembangkan kota yang berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Tangerang untuk memiliki dokumen strategis yang jelas dan terstruktur untuk menghadapi tantangan ini. Arsitektur SPBE (Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik) merupakan salah satu dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah Kota Tangerang sebagai panduan dalam mengembangkan kota yang berkelanjutan.

Dalam Arsitektur SPBE Kota Tangerang, terdapat beberapa inisiatif strategis yang disusun untuk mengembangkan kota yang berkembang secara berkelanjutan. Tabel III 1 Kondisi Arsitektur dan Rencana Tindakan menyajikan daftar inisiatif strategis yang perlu diimplementasikan. Rencana tindakan yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan wujud dari inisiatif strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rencana tindakan harus diimplementasikan dengan tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028 juga merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Kota Tangerang. Peta Rencana SPBE Kota Tangerang terdapat dalam Tabel IV 1, dan berisi peta rencana untuk mengembangkan kota yang berkembang secara berkelanjutan. Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028 berisi daftar prioritas dan rekomendasi pengembangan kota di Kota Tangerang. Peta tersebut harus dijadikan panduan dalam mengembangkan kota yang berkembang secara berkelanjutan.

No	Program/ Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun Dasar		Tahun				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		BAPPEDA DAN DISKOMINFO BIDANG EGOV	1 Dokumen				1 Dokumen		
4	Aplikasi								
(A2; A3; A4; A5)	A Program Pengembangan Aplikasi								
		Pembaruan fitur aplikasi sesuai skala prioritas	15 Aplikasi	15 Aplikasi	15 Aplikasi	11 Aplikasi	7 Aplikasi	5 Aplikasi	
		FGD Peningkatan Aplikasi Kota Tangerang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
5	Infrastruktur								
(11-19)	A Program Peningkatan Infrastruktur TIK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Integrasi jaringan Kota Tangerang dengan Pusat Data Nasional		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
		Pengembangan Private Cloud Kota Tangerang		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
		Pembaruan Perangkat Keras		1 Paket					
		Pembaruan Pendukung Perangkat Keras TIK		1 Paket					
		Pengadaan rack dan server		1 Paket					

No	Program/ Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun Dasar		Tahun				
			2023 Baseline	2024 Target	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	
	Penambahan peningkatan perangkat penyimpanan	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Penambahan perangkat penyimpanan	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Pengadaan router, switch, access point, dan perangkat jaringan lainnya	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Pengembangan Security Operation Center	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket	1 Paket		1 Paket		
	Pengadaan server keamanan	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Pembaruan sensor data center	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Pengadaan perangkat <i>peripheral</i> Kota Tangerang	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Penerapan layanan <i>middleware</i> untuk sistem penghubung layanan Pemerintah Kota Tangerang	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota Tangerang	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket	1 Paket		1 Paket		
6	Keamanan								

No	Program/ Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun Dasar		Tahun				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			Baseline	Target	Target	Target	Target	Target	Target
(K1; D7; I10)	A Program Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK								
	Melakukan instalasi Honeypot secara menyeluruh	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Melakukan Pembaruan dan pengembangan DMZ pada infrastruktur TIK	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Menyediakan layanan <i>security as a service</i> untuk pengguna TIK dan SPBE	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Meningkatkan ruang lingkup ISO 27001:2013	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Kegiatan					
	Melakukan uji kelaiakan terkait keamanan infrastruktur	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Laporan					
	Melakukan uji kelaiakan terkait keamanan sistem penghubung layanan	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Laporan					
	Melakukan uji kelaiakan terkait keamanan Jaringan intra pemerintah	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Laporan					

No	Program/ Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Tahun Dasar		Tahun				
			2023 Baseline	2024 Target	2025 Target	2026 Target	2027 Target	2028 Target	
	Pengujian aplikasi/sistem dengan pentester atau audit khusus keamanan	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Laporan					
	Pembaruan keamanan <i>Microsoft</i> dan API / interoperabilitas data / JW dan Penetration Testing	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Melakukan Penetration Testing	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan
	Mengembangkan BCP dan Penetration Testing	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Dengan melakukan pelatihan dan seminar keamanan informasi	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Kegiatan					
	Kampanye penggunaan <i>software original</i>	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Kegiatan					
	Penggunaan tanda tangan elektronik di setiap aplikasi yang ada di Kota Tangerang	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Paket					
	Menerapkan dan melakukan seminar kesadaran perlindungan data pribadi	DISKOMINFO BIDANG TIK		1 Kegiatan					
7	Audit TIK								

BAB V

PENUTUP

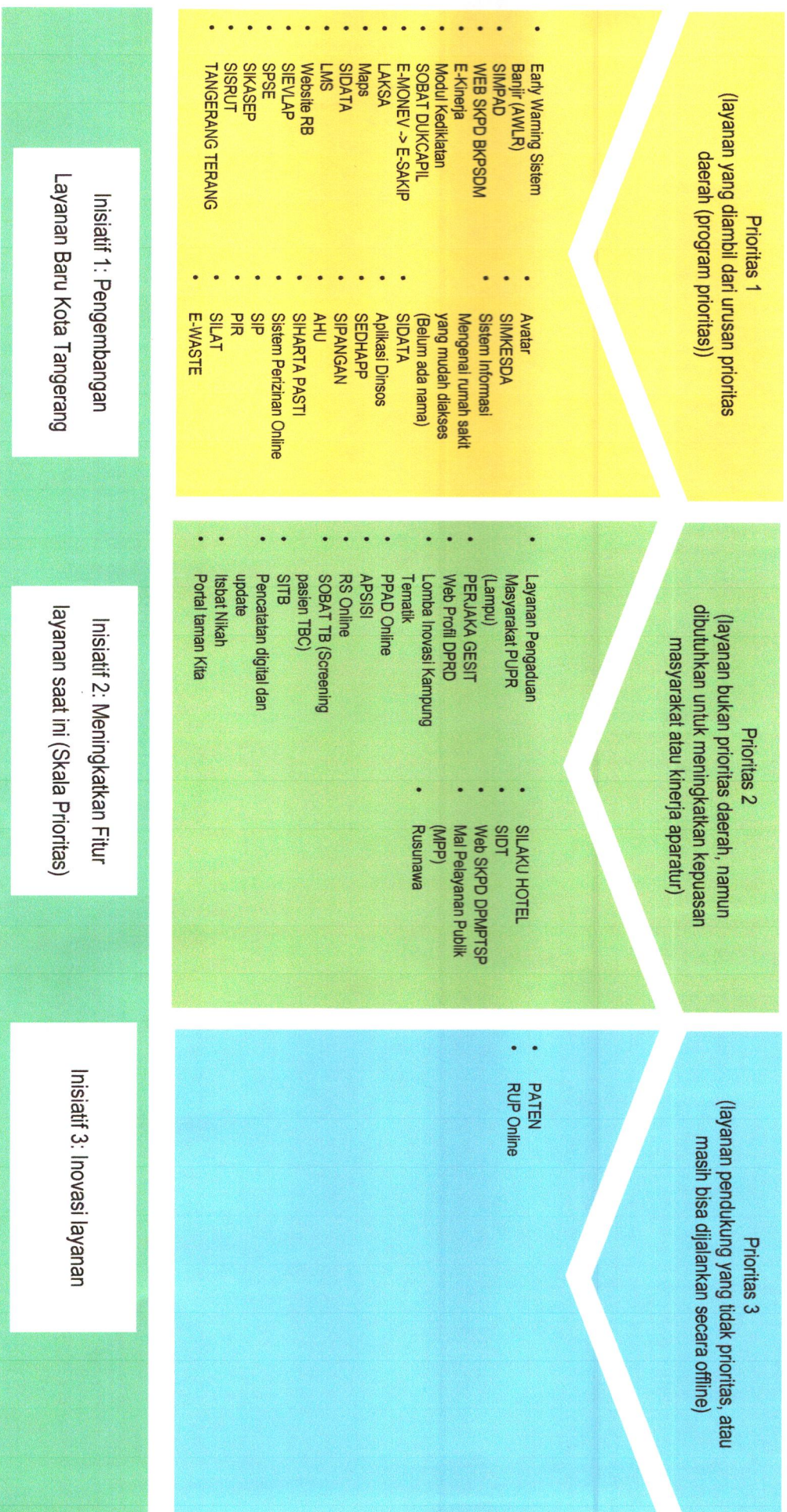
Penyusunan Dokumen Peta Rencana Kota Tangerang tahun 2023-2028 telah mencapai tahap akhir dengan memuat kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi SPBE di Kota Tangerang. Peta rencana ini akan menjadi acuan di Kota Tangerang ke depannya dalam pengembangan SPBE maka dari itu pembuatan peta rencana dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kota Tangerang meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kota Tangerang meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk peta rencana yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan.

Dengan adanya Peta Rencana Kota Tangerang 2023-2028 ini, yang bersifat dinamis, yang senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Kota Tangerang dengan terintegrasi dalam perencanaan daerah Kota Tangerang 5 (lima) tahunan RPJMD diharapkan ke depannya dapat dengan mudah dilakukan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tangerang yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

LAMPIRAN

1. Prioritas Peningkatan Fitur Aplikasi



Prioritas 1 Peningkatan Fitur			Prioritas 2 Peningkatan Fitur			Prioritas 3 Peningkatan Fitur		
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
Early Warning Sistem Banjir (AWLR)	Penambahan fitur.	DPUPR	Layanan Pengaduan Masyarakat PUPR (Lampu)	Harapannya aduan dari masyarakat langsung terhubung ke LAKSA (saat ini masih terhubung dengan WhatsApp)	DPUPR	PATEN	Belum berjalan optimal karena kurangnya atensi dari masyarakat.	Kecamatan
SIMPAD	- Integrasi SIMPAD dgn aplikasi lainnya, tahun ini targetnya sudah GO LIVE - Pelaporan langsung dari SIMPAD ke SIPD (tidak lagi menggunakan SIKEUDA)	BPKD	PERJAJA GESIT	Aplikasi pengaduan yang terintegrasi dengan LAKSA	DPUPR	RUP Online	Integrasi dengan E-Proc, kendalanya yaitu LKPP tidak memberikan web service penggunaan datanya.	Setda

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
WEB SKPD BKPSDM	penyempurnaan fitur di bkpsdm.tangeran.go.id dan SIMASN	BKPSDM	Web Profil DPRD	Penambahan fitur informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dewan (newsletter) dan penambahan fitur komentar	Sekretariat DPRD
E-Kinerja	Penyesuaian dengan regulasi baru	BKPSDM	Lomba Inovasi Kampung Tematik	Integrasi (menu baru) ke aplikasi Kampung Tematik	Bappeda
Modul Kediklatan	Integrasi ke SIMASN	BKPSDM	PPAD Online	Penambahan menu laporan kategori Akta Pemenuhan Tanggungan.	Bapenda
SOBAT DUKCAPIL (Sarana Online Bantu Administrasi Tuntas)	- Akan menjadi aplikasi integrasi untuk seluruh layanan mengurus dokumen, termasuk aplikasi inovasi pada Dokumen	Disdukcapil	APSISI	Penambahan persetujuan mengetahui RTRW	BPBD

Prioritas 1 Peningkatan Fitur			Prioritas 2 Peningkatan Fitur			Prioritas 3 Peningkatan Fitur		
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
	Keputusan Walikota 2021 - Penyamaan fitur antara versi web dan Mobile							
E-MONEV -> E-SAKIP	Sedang dikembangkan menjadi E-SAKIP (Integrasi ke PANRB)	Bappeda	RS Online	Profil Rumah Sakit di Kota Tangerang	Dinkes			
LAKSA	Kedepannya akan ada integrasi LAKSA dan SP4N Lapor ke pusat.	Diskominfo	SOBAT TB (Screening pasien TBC)	Mirroring ke TangerangLive.	Dinkes			
Maps	Maps untuk geospasial masih dalam proses pengembangan	Diskominfo	SITB	Akan Integrasi dengan SOBAT TB.	Dinkes			

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
SIDATA	Kedepannya akan terintegrasi dengan aplikasi lain.	Diskominfo	Pencatatan digital dan update	Menginginkan data yang update secara realtime untuk kepentingan kemudahan, contohnya seperti pelatihan yang diikuti, event-event yang diikuti untuk menentukan siapa yang akan berangkat ke event yang lebih besar.	Dispora
LMS	Rebranding LMS ke KMS (berdiri sendiri) untuk website Kota Tangerang.	Diskominfo	tsbat Nikah	Belum bisa digunakan dikarenakan ada kesulitan untuk mengupload data dari kewilayahan.	DP3AP2KB
LAKSA	Akan ada Integrasi antara SP4N Lapor dan LAKSA.	Setda	Portal taman Kita	Penambahan fitur di bidangnya.	Disbudpar

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
Website RB	Integrasi aplikasi terkait perubahan terintegrasi ke Website RB terkait 8 Perubahan, tujuannya adalah mempermudah evaluator dengan mengecek satu website saja yaitu website RB.	Setda	SILAKU HOTEL	Penambahan fitur kunjungan dari restoran, tempat hiburan, karaoke, bioskop (tidak hanya menampilkan informasi mengenai hotel saja).	Disbudpar
SIEVLAP	- Integrasi dengan LPSE untuk memantau progress proyek dan proses lelang. - Integrasi ke SIPD, kendalanya yaitu sulit mendapatkan penggunaan data bersama dari kemandagri	Setda	SIDT	Updating data berdasarkan data yang diminta oleh pusat.	DPPKUKM

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
SPSE	Perbaikan pada bagian update data, dikarenakan untuk saat ini untuk pekerjaan di RUP datanya tidak akurat	Setda	Web SKPD DPMPTSP	Penambahan fitur pengaduan masyarakat	DPMPTPSP
SIKASEP	Penambahan fitur Edit yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan data yang telah diinputkan oleh peserta sebelumnya dan untuk proses riset data peserta.	Dinkes	Mal Pelayanan Publik (MPP)	Pengintegrasian pelayanan ke dalam satu sistem yang disebut "MPP on Gawai", nantinya warga bisa mengakses SKCK secara online melalui smartpone, dan lain sebagainya.	DPMPTPSP
SISRUT	Perubahan dan peralihan menu pada aplikasi SISRUT dan akan terintegrasi dengan Klinik (saat ini hanya	Dinkes	Web SKPD Dishub	Menginginkan menjadi portal untuk open data share ke publik.	Dishub

Prioritas 1 Peningkatan Fitur			Prioritas 2 Peningkatan Fitur			Prioritas 3 Peningkatan Fitur		
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
	terintegrasi dengan puskesmas dan RS)							
Avatar	Semua informasi mengenai covid maupun imunisasi ingin integrasi ke aplikasi Avatar.	Dinkes	Rusunawa	Harapannya akan menjadi aplikasi seperti hotel (menampilkan data penghuni maupun ketersediaan kamar).	Disperkim			
SIMKESDA	Menginginkan data mengenai kesehatan dapat terintegrasi ke SIMKESDA.	Dinkes						
Sistem Informasi Mengenal rumah sakit yang mudah diakses (Belum ada nama)	Ingin mempunyai sebuah platform yang memungkinkan menampilkan informasi lengkap mengenai rumah sakit, mempunyai	RSUD Kota Tangerang						

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
	layanan MCU yang mudah diakses bagi OPD dan Masyarakat.				
SIDATA	- Penambahan fitur pendataan PMKS (akan ada data penerima bansos) - Ingin integrasi secara langsung dengan DTKS, karena untuk saat ini jika ingin <i>input</i> data diharuskan untuk mendownload terlebih dahulu lalu upload kembali.	Dinsos			

Prioritas 1 Peningkatan Fitur			Prioritas 2 Peningkatan Fitur			Prioritas 3 Peningkatan Fitur		
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
Apikasi Dinsos	Diharapkan bisa mengelola data-datanya secara mandiri (Update upload dan Sistem Laporan)	Dinsos						
E-Pesiran	Menjadi Aplikasi utama yang terintegrasi dengan Portal Taman Kita, SILAKU HOTEL, serta penambahan database mengenai Kebudayaan dan Kuliner.	Disbudpar						
SEDHAPP (Sistem elektronik Harga Komoditas)	Ingin ada penambahan fitur pendataan pasokan dari distributor dan agen	DKP						

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
SIPANGAN	Ingin ada penambahan fitur pendataan penambahan produksi dari TKWP, UMKM, dan DKP.	DKP			
AHU	Peningkatan keakuratan data koperasi yang ada di aplikasi dan di lapangan.	DPPKUKM			
SIHARTA PASTI	Aplikasi untuk monitoring harga dari bidang perdagangan dalam negeri secara online	DPPKUKM			
Sistem Perizinan Online	- Penambahan fitur untuk survei kepuasan masyarakat - Ingin terintegrasi dengan aplikasi OSS dan SIMBG. - Konsultasi	DPMPPTFSP			

Prioritas 1 Peningkatan Fitur			Prioritas 2 Peningkatan Fitur			Prioritas 3 Peningkatan Fitur		
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
	terakut perizinan <i>online</i> hanya menggunakan zoom dan tidak harus datang langsung ke kantor							
SIP	Integrasi dengan aplikasi DPMPPTSP yang bertujuan agar investor dapat melihat potensi investasi di Kota Tangerang.	DPMPPTSP						
PIR (Potensi Investasi Regional)	Akan menyusun <i>Yellow Pages</i> antara umk dan perusahaan di Kota Tangerang, perhitungan NSR, dan Peta Investasi.	DPMPPTSP						

Prioritas 1 Peningkatan Fitur		Prioritas 2 Peningkatan Fitur		Prioritas 3 Peningkatan Fitur	
Nama Aplikasi	Uraian	Dinas	Nama Aplikasi	Uraian	Dinas
SILAT	Menampilkan informasi mengenai jumlah kendaraan yang telah diuji secara per-day, dapat dilihat nantinya yang lulus uji dan tidak dan ingin integrasi ke super app yaitu Sistem Informasi Perhubungan.	Dishub			
TANGERANG TERANG	Aplikasi untuk melihat day per-day untuk penerangan, bertujuan untuk mengetahui kelayakan serta pemetaan lampu penerangan jalan.				
E-WASTE	Ingin Integrasi dengan Bank Sampah dan TPS3R.	DLH			

2. Prioritas Aplikasi Baru

